



Koran	Hal
Haluan	2
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Anggota DPRD Kritik Anggaran Pokir

**PADANG, HALUAN** — Anggota DPRD Sumbar Komi Chaniago menyampaikan kritik atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov dalam merealisasikan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Disebut Komi anggaran pokir anggota DPRD Sumbar banyak yang tak terealisasi maksimal, bahkan ada pokir yang hilang di jalan.

Untuk pokir yang hilang, Komi mengaku hal ini ia alami sendiri. Sekitar Rp1 miliar pokir milliknya yang mesti direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat Padang Pariaman sebagai daerah pemilihannya (Dapil) tiba-tiba tidak ada lagi.

Untuk pembelian komputer Rp600 juta untuk salah satu SMA, serta pembastan pagar Rp400, itu hilang tanpa ada sedikitpun pemberitahuan. "Komi, Selasa (6/3). Kalau pokir yang diusulkan dewan akan dialihkan untuk kebutuhan lain, menurut Komi, Bappeda

harusnya menyampaikan pada dewan bersangkutan. Bukannya tiba-tiba hilang begitu saja. Sebab anggaran pokir ini telah disepakati saat pembahasan APBD yang dilakukan tahun lalu.

Komi menambahkan, pokir yang diusulkan anggota DPRD seharusnya diakomodir oleh OPD Pemprov karena ini dibolehkan dan sudah diatur dalam Permendagri. "Yang namanya pokir pasti kebutuhan mendesak rakyat yang ditanggap dewan ketika menyaring aspirasi di tengah masyarakat. Seharusnya pihak eksekutif memberi peluang itu terealisasi," ucapnya.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP, PKB dan PBB ini mengatakan, pokir diajukan dewan menandakan para wakil rakyat memang bekerja melihat kebutuhan masyarakat di daerah. "Dewan dipilih perdapil karena ga mungkin gubernur bisa melihat seluruh daerah. Itulah sebabnya diadakan wakil rakyat untuk menyambung aspirasi rakyat, tapi kalau aspirasi itu yang dihilangkan sama halnya pembunahan karakter terhadap dewan bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar dari Dapil I Kota Padang, Afrizal juga menuturkan terkait pokir ini, di Kota Padang DPRD Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar. Itu berasal pokir 10 anggota DPRD Sumbar Dapil Kota Padang. Namun dari semua anggaran itu masih banyak dana yang belum terealisasi.

Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lain, Apris menyebut salah satu bukti tak terealisasi maksimalnya dana pokok pikiran anggota DPRD Sumbar adalah, ia mengaku pernah mengururkan anggaran untuk membedah sebanyak 22 rumah. Namun setelah ia cek di lapangan si penerima bodah rumah mengaku petugas hanya membelikan bahan bangunan beserta memberikan upah, setelah itu, petugas tidak pernah datang lagi. (tifen)